

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a tax on income and other payments in any kind with respect to employment, occupation, and activities. The aim of this research are to understand conformity rates, calculating and reporting the real income tax article 21 on employees' salaries in DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya with laws and regulations, and problems that may occur in the fulfillment of tax obligations on income tax article 21 of employees' salaries in DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya.

The samples used on this research consist of 51 permanent employees and 2 non-permanent employees. The data were analyzed descriptively starting from data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of the research were (1) imposition of tariffs on all components of the calculation and reporting used by DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya in accordance with applicable laws and regulations, except the imposition of tariff on THT contribution, (2) the mistake on tariff of THT contribution made income tax calculation article 21 of the employees' salaries to be wrong and the reporting of income tax article 21 was done by each employee to the KPP Pratama Kabupaten Pematang Jaya, (3) the main problem of tax obligations' fulfillment on income tax article 21 in DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya for salaries was the lack of knowledge among employees for tax laws, especially related to article 21 income tax.

Keywords: Calculating, Reporting, Income Tax Article 21.

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, dan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengenaan tarif, kebenaran penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta permasalahan yang mungkin terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya.

Sampel yang digunakan untuk penelitian atas pegawai tetap sebesar 51 orang pegawai dan untuk pegawai tidak tetap berjumlah 2 orang pegawai. Analisis data dilakukan secara deskriptif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) pengenaan tarif dalam seluruh komponen penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pengenaan tarif pada Iuran THT, (2) kesalahan atas penerapan tarif Iuran THT membuat penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai menjadi keliru dan pelaporan PPh Pasal 21 tersebut dilakukan oleh masing-masing pegawai ke KPP Pratama Kabupaten Pematang Jaya, (3) permasalahan utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai di DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya adalah kurangnya pengetahuan para pegawai atas peraturan perpajakan, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21.

Kata-kata kunci: Penghitungan, Pelaporan, PPh Pasal 21.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.1.1 Pajak	6
2.1.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1.2 Fungsi Pajak	7

2.1.1.3	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	8
2.1.1.4	Tarif Pajak	11
2.1.1.5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	12
2.1.2	Jenis-Jenis Pajak	13
2.1.3	Pajak Penghasilan	15
2.1.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	15
2.1.3.2	Pemotong PPh Pasal 21	15
2.1.3.3	Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21	17
2.1.3.4	Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21.....	20
2.1.3.5	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21	24
2.1.3.6	Pengurangan Yang Diperbolehkan	27
2.1.3.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	29
2.1.3.8	Tarif Pajak PPh Pasal 21 dan Penerapannya	30
2.1.3.9	Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan	33
2.1.4	Saat Terutang PPh Pasal 21	37
2.1.5	Surat Pemberitahuan (SPT)	37
2.1.6	Sanksi Administrasi	40
2.2	Kerangka Pemikiran	42
 BAB III METODE PENELITIAN.....		46
3.1	Objek Penelitian	46
3.2	Jenis Penelitian.....	46

3.3	Populasi dan Sampel	46
3.3.1	Populasi.....	46
3.3.2	Sampel	47
3.4	Jenis Data	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6	Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
4.1	Hasil Penelitian	52
4.1.1	Pengenaan Tarif dalam Penghitungan dan Pelaporan	
	PPh Pasal 21	52
4.1.2	Analisis Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	57
4.1.2.1	Penghitungan PPh Pasal 21	57
4.1.2.2	Pelaporan PPh Pasal 21	60
4.1.3	Permasalahan yang Terjadi dalam Pemenuhan Kewajiban	
	PPh Pasal 21	60
4.2	Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	Tarif Pasal 17 UU PPh 30
Tabel II	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian a 33
Tabel III	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian b 34
Tabel IV	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian c 34
Tabel V	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian d 35
Tabel VI	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap bagian e 35
Tabel VII	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap bagian a 36
Tabel VIII	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap bagian b 37
Tabel IX	Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Denda 40
Tabel X	Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Bunga 41
Tabel XI	Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Kenaikan 42
Tabel XII	Penelitian Terdahulu 43
Tabel XIII	Tunjangan Jabatan Struktural 53
Table XIV	Tunjangan Umum 54
Tabel XV	Tunjangan Beras 54
Tabel XVI	Penghitungan Iuran THT oleh DPPKAD Kab. Pemalang 56
Tabel XVII	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS DPPKAD Kab. Pemalang sebelum evaluasi 58
Tabel XVIII	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS DPPKAD Kab. Pemalang sebelum evaluasi (lanjutan) 59

Tabel XIX	Penghitungan Iuran THT menurut DPPKAD Kab. Pemalang dan Peraturan Pemerintah (PP).....	63
Tabel XX	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS DPPKAD Kab. Pemalang sesudah evaluasi	64
Tabel XXI	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS DPPKAD Kab. Pemalang sesudah evaluasi (lanjutan)	65
Tabel XXII	Selisih PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Evaluasi	66